

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bagian ini akan berfokus pada penjelasan mengenai kesimpulan dari penelitian yang menjawab rumusan masalah sebelumnya. Selain itu, dipaparkan juga berbagai implikasi penelitian khususnya pada hal-hal yang bersifat teoritis serta konsep-konsep untuk memberikan pemahaman ranah keilmuan pun yang bersifat teknis yang secara otomatis bertaut dengan kehidupan. Simpulan serta implikasi yang dimaksud akan menjadi landasan peneliti untuk memberikan rekomendasi yang tujuannya untuk masyarakat, pemerintah khususnya entitas akademis seperti halnya kampus Universitas Pendidikan Indonesia dan prodi Pascasarjana PKn UPI.

5.1. Simpulan

5.1.1. Simpulan Umum

Uraian umum mengenai perencanaan Diskominfo Jabar dalam penguatan *digital civic literacy* untuk mengatasi *hate speech* di era *post truth* menunjukkan adanya langkah perencanaan yang dilakukan Diskominfo Jabar sebelum melakukan agenda literasi digital. Dengan rapat koordinasi bidang, diseminasi sasaran kegiatan, pemetaan indikator keberhasilan serta rencana kolaborasi merupakan perencanaan yang dilakukan Diskominfo Jabar. Dalam hal perencanaan, Diskominfo Jabar secara umum berperan dalam penguatan *digital civic literacy*. Mengenai pelaksanaan literasi digital oleh Diskominfo Jabar sudah dilakukan sejak tahun 2018 di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat baik secara *off /online*. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam bentuk serta materi yang diberikan yang menunjukkan penguatan nalar kritis, kolaborasi serta kreativitas. Namun dalam peningkatan keterampilan komunikasi dan mengolah informasi tidak terlalu berperan.

Keberhasilan Diskominfo Jabar dalam penguatan literasi digital tidak secara spesifik ditunjukkan melalui indeks peningkatan/penurunan literasi digital masyarakat di tahun 2022. Artinya Diskominfo tidak memiliki akurasi data keberhasilan meliterasi secara digital masyarakat Jawa Barat. Namun terdapat data penurunan aduan/laporan mengenai berbagai kasus *hate speech* dan juga hoaks dari tahun 2020-2022, hal ini berarti Diskominfo Jabar berperan dalam mengatasi *hate speech*. Indikator keberhasilan lain yang menjadi acuan adalah sikap masyarakat yang lebih bijaksana dalam menaruh pernyataan di kolom komentar/*unggah*an berbagai kanal media sosial ditambah peningkatan atensi

masyarakat kepada Diskominfo Jabar yang dapat dilihat dari peningkatan *insight* instagram Diskominfo Jabar. Hasil keberhasilan meliterasi digital belum dapat dilihat dari 4 indikator kecakapan digital masyarakat (*ethics, culture, safety*, hingga *skills* digital) disertai puluhan sub indikator yang menjadi acuan keberhasilan karena agenda literasi digital tahun 2022 selesai di bulan oktober.

Hambatan yang utama dalam meliterasi digital adalah paradigma bahwa Diskominfo Jabar dengan berbagai unit kerjanya tidak berwenang dalam menjustifikasi peristiwa *hate speech/bukan*. Untuk mengatasi *hate speech* (suku, agama, ras, kelompok/golongan, hingga pilihan politik tertentu), dibutuhkan kolaborasi semua pihak dan hambatannya adalah bagaimana kolaborasi tidak berjalan sempurna. Hal tersebut berujung pada bagaimana suatu giat literasi digital tidak berjalan, ditambah lagi pelaksanaan literasi yang tidak menjangkau berbagai daerah terluar/pesisir dan terdalam (pedalaman). Upaya yang dibutuhkan lebih dari sekadar program *off/online* dalam literasi digital, gabungan keduanya (*hybrid*) dibutuhkan sebagai solusi menjangkau daerah-daerah yang jauh dari jangkauan. Selain itu pembentukan JSH dan mungkin IKP di setiap kota/kabupaten dengan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan kepolisian di wilayah Jawa barat. Diskominfo juga perlu meluncurkan buku sebagai pedoman serta panduan utuh bagi warga digital dalam menyikapi *post truth* era.

Secara umum, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Diskominfo Jabar berperan dalam penguatan *digital civic literacy* untuk mengatasi *hate speech* di era *post truth*. Namun dalam hasil peningkatan indeks literasi digital masyarakat jawa barat belum mampu ditunjukkan Diskominfo jabar karena agenda literasi digital selesai pada bulan oktober 2022 mendatang. Selain itu, peran Diskominfo Jabar juga terlihat dalam upaya mengatasi *hate speech* dengan menurunnya laporan mengenai ujaran kebencian di tahun 2020-2022. Dalam peran pembentukan sikap di era *post truth* ditunjukkan dengan kondisi masyarakat yang bijak bermedia sosial ditunjukkan dengan peningkatan *insight* Instagram. Memastikan masyarakat lebih peka dan memiliki kontra-narasi serta alternatif narasi ketika berada dalam kerumunan narasi *hate speech* dan hoaks. Selanjutnya adalah memperkuat diri dengan berprinsip bahwa hanya konten positif yang akan disebar oleh jarinya.

5.1.2 Simpulan Khusus

Dalam simpulan khusus kali ini akan berfokus pada hasil analisis data baik observasi, dokumentasi, wawancara pun kuesioner. Oleh sebab itu peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan khusus yang berangkat dari rumusan masalah sebelumnya. Beberapa hasil analisis data penelitian dalam simpulan khusus dapat peneliti sampaikan sebagai berikut.

- 1.) **Perencanaan** Diskominfo Jabar dalam penguatan *digital civic literacy* untuk mengatasi *hate speech* di era *post truth* dimulai dengan rapat koordinasi untuk menentukan agenda dan inovasi kegiatan. Dilanjutkan dengan diseminasi/sasaran kegiatan untuk kemudian juga memetakan permasalahan dan target instansi untuk melakukan kolaborasi. Selanjutnya adalah menentukan daerah mana yang perlu jangkauan literasi digital di Jawa barat. Ketiga langkah utama perencanaan tersebut episentrumnya adalah visi-misi Diskominfo Jabar dalam merealisasikan setiap giatnya. Perencanaan menjadi sesuatu yang tidak terelakan sebelum melaksanakan agenda literasi digital masyarakat sebagai faktor utama penentu keberhasilan kegiatan.
- 2.) **Pelaksanaan** literasi digital oleh Diskominfo Jabar melibatkan unit kerja didalam tubuh Diskominfo Jabar seperti Jabar Saber hoaks (JSh) dan bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP). Pelaksanaan literasi digital sudah dilakukan sejak tahun 2018 di 27 kota/kabupaten di Jawa barat baik secara *off/online*. Bentuk kegiatannya beragam mulai dari *webinar*, *seminar*, *talkshow*, pelatihan, hingga *stream youtube/ig*, *podcast*, juga siaran keliling (*sarling*) ‘menjemput bola’ mendatangi masyarakat juga sebaran konten positif di berbagai kanal medsos. Materi yang diberikan berupa strategi/tip klarifikasi informasi, mengolah informasi, bermedia sosial dengan bijak, tip tidak mudah menyebarkan dan tidak mudah terprovokasi hingga berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Upaya preventif untuk mencegah *hate speech* juga menjadi substansi utama dalam materi Diskominfo meliterasi masyarakat secara digital. Sasaran kegiatannya beragam, mulai dari pelajar, Mahasiswa, masyarakat pun warganegara digital/netizen. Dengan menggunakan prinsip kolaborasi pentaheliks (ABCGM). Prinsip kolaborasi ini melibatkan akademisi, pengusaha, komunitas, pemerintah dan juga media. Kolaborasi bersama penegak hukum pun sering dilakukan seperti halnya kepolisian dari

sektor, resort, hingga daerah. Bentuk kolaborasi yang tercipta mulai dari pematerian, hingga berbagai mengenai strategi literasi masyarakat agar terfilterisasi dengan baik. Adapun sikap yang diharapkan dari berbagai bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah bijaksana dalam bermedia sosial, mampu memfilter informasi, memiliki pemikiran kritis, kreativitas, hingga kapasitas dalam komunikasi yang baik.

- 3.) **Keberhasilan** Diskominfo dalam meliterasi secara digital dapat dilihat dari penurunan aduan kepada Diskominfo mengenai berbagai isu *hate speech* dan juga hoaks. Indikator keberhasilan lain yang menjadi acuan adalah sikap masyarakat yang lebih bijaksana dalam menaruh pernyataan di kolom komentar/*unggahan* nya. Selain itu juga peningkatan atensi masyarakat kepada Diskominfo Jabar dapat dilihat dari peningkatan *insight* instagram Diskominfo Jabar. Keberhasilan literasi digital juga dapat dilihat dari 4 indikator kecakapan digital masyarakat (*ethics, culture, safety, hingga skills* digital) disertai puluhan sub indikator yang menjadi acuan keberhasilan. Terakhir adalah indeks literasi digital masyarakat jawa barat yang meningkat dalam hasil survey ILD Indonesia.
- 4.) **Hambatan** yang utama dalam literasi digital adalah paradigma bahwa Diskominfo Jabar dengan berbagai unit kerjanya tidak berwenang dalam menjustifikasi peristiwa *hate speech/bukan*. Meski begitu posisi Diskominfo jabar menegaskan bukan ranahnya untuk memberikan penghakiman dalam suatu peristiwa. Independensi ini merujuk pada pola klasifikasi dan pengolahan informasi dari berbagai media tervalidasi di dewan pers untuk menentukan sikap (*hate speech/bukan*) hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengolah informasi. Untuk mengatasi *hate speech* (suku, agama, ras, kelompok/golongan, hingga pilihan politik tertentu), dibutuhkan Kolaborasi semua pihak dan hambatannya adalah bagaimana kolaborasi tidak berjalan sempurna, hal tersebut berujung pada bagaimana suatu giat literasi digital tidak berjalan. Ditambah lagi pelaksanaan literasi yang tidak menjangkau berbagai daerah terluar/pesisir dan terdalam (pedalaman).
- 5.) **Upaya** yang dibutuhkan lebih dari sekadar program off/on dalam literasi digital. Gabungan keduanya (*hybrid*) dibutuhkan sebagai solusi menjangkau daerah-daerah yang jauh dari jangkauan. Selain itu pembentukan JSH dan mungkin IKP di setiap kokab adalah solusi terbaik saat ini. Persiapan yang lebih

maksimal agar tidak ada waktu yang terbuang akibat kesalahan pemateri. Diskominfo juga perlu meluncurkan buku sebagai pedoman serta panduan utuh bagi warga digital dalam menyikapi *post truth* era. Lalu memastikan masyarakat lebih peka dan memiliki kontra-narasi serta alternatif narasi ketika berada dalam kerumunan narasi *hate speech* dan hoaks. Selanjutnya adalah memperkuat diri dengan berprinsip bahwa hanya konten positif yang akan disebar oleh jarinya.

5.2 Implikasi

Adapun implikasi yang didapatkan berangkat dari kesimpulan umum pun khusus penelitian ini khususnya dalam penguatan *digital civic literacy* untuk mengatasi *hate speech* di era *post truth* adalah sebagai berikut.

- 1.) Perencanaan yang sebelumnya hanya dengan rapat koordinasi untuk menentukan agenda dan inovasi kegiatan dalam perencanaan. Ditambahkan dengan evaluasi/agenda literasi digital. Mengenai diseminasi/sasaran kegiatan untuk kemudian juga memetakan target peserta kegiatan disabilitas (tuna rungu, tuna daksa, tuna wicara) dalam agenda literasi digital. Lalu dalam perencanaan yang awalnya hanya menentukan daerah mana yang perlu jangkauan literasi digital di Jawa barat. Ditambahkan dengan menentukan wilayah terliterasi (pesisir & pedalaman).
- 2.) Kegiatan literasi digital yang awalnya berbentuk *webinar*, seminar, *talkshow*, pelatihan, hingga stream *youtube/ig*, *poddcast*, juga siaran keliling (*sarling*). Harus diperbaiki dengan ‘menjemput bola’ mendatangi masyarakat juga konsistensi dalam konten positif di berbagai kanal medsos. Materi yang diberikan awalnya berupa strategi/tip klarifikasi informasi, mengolah informasi, bermedia sosial dengan bijak, tip tidak mudah menyebarkan dan tidak mudah terprovokasi hingga berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Ditambahkan dengan upaya preventif untuk mencegah *hate speech* sejak dini harus menjadi substansi utama dalam materi Diskominfo meliterasi masyarakat secara digital di kota/kabupaten.
- 3.) Sasaran kegiatan yang awalnya pelajar, Mahasiswa, harus diimbangi dengan masyarakat umum pun warganegara digital/netizen juga memetakan target peserta kegiatan disabilitas (tuna rungu, tuna daksa, tuna wicara) dalam agenda literasi digital. Dengan menggunakan prinsip kolaborasi pentaheliks (ABCGM). Prinsip kolaborasi ini juga baiknya menambahkan unsur P (*people*). Kolaborasi bersama

penegak hukum pun harus intens dilakukan seperti halnya kepolisian dari sektor, resort, hingga daerah. Bentuk kolaborasi yang tercipta mulai dari pematerian, sosialisasi hingga berbagai mengenai strategi meliterasi masyarakat agar terfilterisasi dengan baik. Adapun sikap yang diharapkan dari berbagai bentuk pelaksanaan kegiatan ini baik nya menambahkan indikator keterampilan abad 21.

- 4.) Terdapat 2 hal yang menjadi implikasi keberhasilan, *pertama* mengenai indikator keberhasilan peningkatan literasi digital dan indikator keberhasilan mengatasi *hate speech*. Juga harus ditambahkan dengan data yang konkret mengenai perubahan sikap masyarakat yang lebih bijaksana dan menjaga jarinya untuk berkomentar kasar/menghinakan di era *post truth* khususnya penurunan dari ujaran kebencian di medsos/warganet jabar yang terpantau Diskominfo dan kepolisian.
- 5.) Ada 2 implikasi upaya & hambatan yang utama dalam meliterasi digital, *pertama* adalah paradigma bahwa Diskominfo Jabar dengan berbagai unit kerjanya tidak berwenang dalam menjustifikasi peristiwa *hate speech/bukan*. *Kedua* untuk mengatasi *hate speech* (suku, agama, ras, kelompok/golongan, hingga pilihan politik tertentu), oleh sebab itu dibutuhkan kolaborasi semua pihak dan hambatannya adalah bagaimana kolaborasi tidak berjalan sempurna, hal tersebut berujung pada bagaimana suatu giat literasi digital tidak berjalan. Ditambah lagi pelaksanaan literasi yang tidak menjangkau berbagai daerah terluar/pesisir dan terdalam (pedalaman). Implikasinya adalah dengan membuat unit secara khusus yang bertanggung jawab dalam meningkatkan indeks literasi digital masyarakat. Juga untuk berinovasi agar masyarakat dapat mengambil kebaikan di era *post truth* dan terhindar dari dampak negatifnya yang salah satunya adalah ujaran kebencian (*hate speech*).

5.3. Rekomendasi

5.3.1 Bagi Diskominfo Jabar

- 1.)Perencanaan yang lebih matang membuat banyak perubahan signifikan bagi kesuksesan literasi digital.
- 2.)Menciptakan program secara khusus di fokuskan untuk mengatasi berbagai isu kontemporer yang hangat diperbincangkan publik.
- 3.)Mengkreasikan agenda provinsi dengan kota/kabupaten di jawa barat agar tercipta sinergitas yang baik.

- 4.) Lebih meningkatkan kolaborasi bersama pihak masyarakat agar apa yang menjadi permasalahan di *grass roots* dapat sampai pada pemerintah khususnya dalam dunia digitalisasi.
- 5.) Meningkatkan indikator peningkatan literasi digital pada program agar menciptakan masyarakat yang memiliki kompetensi / kemampuan abad 21 (kreativitas, nalar kritis, komunikasi serta kolaborasi)

5.3.2 Bagi Prodi Pascasarjana Pendidikan Kewarganegaraan

- 1.) Mengembangkan pembelajaran berlandaskan keterampilan abad 21 khususnya dalam konteks literasi digital.
- 2.) Menjadi pelopor dalam kebebasan penelitian yang tidak terikat hubungan kausalitas instansi atau emosional apapun di era *post truth*.
- 3.) Menjadi sumber rujukan dalam kemajuan peradaban teknologi meskipun dalam ruang lingkup kampus pendidikan.
- 4.) Menjadi bagian dalam perumusan kebijakan pendidikan dalam *digital civic literacy* sebagai langkah preventif dalam berbagai kemungkinan fenomena dan patologi sosial yang akan terjadi dikemudian hari.

5.3.3 Bagi Peneliti dan Peneliti selanjutnya

- 1.) Menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- 2.) Mempersiapkan waktu yang lebih lama dalam penelitian serta instrumen yang lebih matang.
- 3.) Jangkauan lokasi penelitian dalam penelitian ini kurang luas dan tidak mencakup 27 kokab.
- 4.) Penelitian lanjutan mengenai *digital civic literacy* lebih memperdalam agenda serta strategi entitas akademik dalam mengatasi permasalahan yang ada

5.3.4 Bagi Warganegara Digital Jabar

- 1.) Bijaksana dalam bermedsos.
- 2.) Memiliki nalar kritis untuk menyaring informasi
- 3.) Tidak mudah menyebarkan informasi
- 4.) Menjadi warganegara digital yang baik dan cerdas (*smart n good digital citizens*)